

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Sebuah Upaya dan Strategi)

*Dian Iskandar Jaelani **

* SMAN 1 Jonggat – Lombok – NTB
djailani@gmail.com

Abstract

Islam has taught its followers to try to get a good life in this world and in the hereafter in order to achieve well-being both physically and spiritually. Therefore no exaggeration to Islam as a religion can also be said of empowerment, which seeks to empower believers to live a well-balanced between the needs of the duniawi and ukhrawi. So far the Indonesian Islamic community, especially as the majority of people, is still too far away from all the advantages when compared with people in other countries, especially countries which are some of the western Christian, especially the economy. Even very unfortunate, in Islamic societies has occurred which led to economic inequality of wealth circulation only rotates in a group of bourgeois alone. This fact calls for economic empowerment efforts are systematic and continuous to deliver economically egalitarian society and circulation of wealth can be enjoyed by society equally. Therefore, the necessary breakthroughs or empowerment methods that hit. This paper will explain how the efforts and strategies of community economic empowerment in the Islamic perspective.

Keyword: empowerment, economic community, charity.

PENDAHULUAN

Agama Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat agar dapat tercapai kesejahteraan lahir dan batin. Karenanya tidak berlebihan jika agama Islam juga dapat dikatakan sebagai agama pemberdayaan, yang berupaya memberdayakan pemeluknya untuk dapat hidup yang seimbang antara kebutuhan *duniawi* dan *ukhrawi*. Untuk memperolehnya, perlu adanya pemberdayaan yang sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan, bahkan sebagai kekuatan pembebas (*liberating force*) terutama dari ketertinggalan dan ketertindasan ekonomi.

Sejauh ini masyarakat Islam khususnya Indonesia sebagai umat mayoritas, masih terlalu jauh dari segala keunggulan bila dibandingkan dengan umat di negara-negara lain, khususnya negara barat yang notabenehnya kristen terutama perekonomiannya. Bahkan sangat disayangkan, di kalangan masyarakat Islam telah terjadi ketimpangan ekonomi yang menyebabkan sirkulasi kekayaan hanya berputar di sekelompok borjuis saja.

Fakta ini menuntut adanya upaya-upaya pemberdayaan ekonomi yang sistematis dan terus-menerus untuk melahirkan masyarakat yang egaliter secara ekonomi dan sirkulasi kekayaan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Karenanya, diperlukan terobosan-terobosan ataupun metode-metode pemberdayaan yang mengena.

Menurut Agus Efendi sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam*, mencoba menawarkan tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama di hampir semua lini pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual *an sich*.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

Situasi ekonomi masyarakat Islam khususnya di Indonesia yang memprihatinkan, bukanlah untuk diratapi, melainkan untuk dicarikan jalan pemecahannya. Karenanya, untuk keluar dari himpitan ekonomi ini diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap komponen umat, mulai dari kebijakan penguasa yang memihak pada pemerataan ekonomi sampai upaya

dari masyarakat sendiri. Setiap pribadi muslim ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, berwirausaha (*entrepreneurship*), lebih *win-win* dalam bekerja sama, komunikatif dalam berinteraksi, lebih *skillful* dalam memfasilitasi jaringan kerja, dan lebih profesional dalam mengelola potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan riil ekonomi umat. Karenanya, di samping penguasaan terhadap *lifeskill* atau keahlian hidup, ketrampilan berwirausaha, yang lebih riil dan mendesak adalah dibutuhkan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pemberian kesempatan kepada rakyat menengah ke bawah (kecil). Namun sungguh sangat disayangkan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pemberian kesempatan kurang dilirik, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas (konglomerat-borjuis). Akibatnya, kesenjangan ekonomilah yang semakin nampak.

Berpijak dari kenyataan di atas, saat ini sangat dibutuhkan sebuah strategi dan metode pemberdayaan ekonomi yang merata yang dapat dinikmati oleh kalangan ekonomi bawah (rakyat miskin). Pada tataran ini, adalah Taqiyuddin al-Nabhani yang mencoba memberikan gagasan mengenai strategi atau metode pemberdayaan ekonomi umat yang merata. Sebagai seorang tokoh yang mempunyai obsesi; dan idealisasi agar sistem Islam dapat dihidupkan kembali sebagai alternatif, ia banyak menawarkan pemikiran ekonominya yang unik guna menyerang kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kedua sistem tersebut oleh sebagian ahli dianggap telah gagal dalam membangun paradigma ekonomi dunia, sehingga diperlukan sistem ekonomi alternatif, yaitu sistem ekonomi Islam.

Menurut gagasan Taqiyuddin al-Nabhani, Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya di segelintir orang (orang kaya saja) atau sistem konglomerasi. Apabila dalam suatu masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar dalam memenuhi kebutuhannya (seperti sekarang ini), maka negara mengambil tindakan untuk mencegahnya, dengan menciptakan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat. Di dalam al-Qur'an surat Al- Hasyr ayat 59 telah disebutkan: "... *Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....*".

Atas dasar ayat tersebut, Taqiyuddin al-Nabhani menggali dan mencoba menawarkan metode-metode pemerataan ekonomi, seperti: *Pertama*, subsidi oleh pemerintah terhadap rakyat dengan cara memberikan harta negara (*bait al-mal* atau anggaran negara) kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya untuk modal usaha. Dengan pemenuhan tersebut akan tercipta keseimbangan (*equilibrium*) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, apabila negara tidak memiliki anggaran untuk subsidi itu, negara harus membebaskan pajak bagi rakyat lemah (miskin). *Ketiga*, sebisa mungkin pemerintah harus menciptakan keseimbangan ekonomi (*economic equilibrium*) dengan menyuplai rakyat yang miskin, dan menghilangkan ketergantungan seseorang terhadap orang lain dalam pemenuhan ekonominya. *Keempat*, larangan penimbunan uang

(menyimpan uang) oleh sekelompok masyarakat, sebab akan menyebabkan turunnya tingkat pendapatan, serta mengakibatkan pengangguran, yang efek selanjutnya menambah angka kemiskinan. Menurutnya, penimbunan uang berbeda dengan tabungan, jika tabungan diperuntukan untuk saving atau untuk memenuhi kebutuhan yang datang sewaktu-waktu, sedangkan penimbunan tidak. Tabungan tidak akan mempengaruhi aktivitas perekonomian.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap upaya (sebuah konsep pemberdayaan) untuk menciptakan perekonomian yang berdaya dan merata di tengah masyarakat.

PEMBAHASAN

Untuk lebih fokus dan sistematisnya tulisan ini, maka pada pembahasan ini penulis akan mengkaji tentang: 1) Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat; 2) Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat; 3) Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat.

1) Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi umat, perlu dikemukakan tentang pemberdayaan itu sendiri. Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Perberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.

Sedangkan untuk membahas ekonomi umat, maka perlu diperjelas dahulu tentang pengertian ekonomi dan umat. Definisi yang paling populer tentang ekonomi, yaitu bahwa ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Di sini, titik tekan definisi adalah pada kegiatan produksi dan distribusi baik dalam bentuk barang ataupun jasa.

Definisi lain mencakup aspek yang lebih luas, misalnya yang terdapat pada *Oxford Dictionary of Current English* sebagaimana dikutip

Muhammad dan Alimin dalam *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, dikatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat manusia. Pada definisi ini, selain ada aspek konsumsi, juga tercakup obyek kegiatan ekonomi, yaitu kekayaan, yang tidak lain adalah kekayaan material.

Selanjutnya, ketika membahas perekonomian umat, maka ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam.

Kedua, yang dimaksud perekonomian umat itu adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh muslim-santri. Batasan ini mempunyai masalah tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islam dan mana pula yang abangan. Sebagai contoh, apakah seorang pengusaha besar tertentu yang dikenal kesalehannya, dapat digolongkan ke dalam pengusaha santri? Jika menengok bahwa ia menjalankan shalat, maka ia dapat dikategorikan sebagai santri, tetapi ia tidak masuk ke dalam anggota maupun pendukung gerakan Islam, maka ia bukan santri atau Islam fungsional.

Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam. Indikator ini mengacu kepada perusahaan-perusahaan yang dikembangkan oleh gerakan Nasrani yang telah berhasil membangun diri sebagai konglomerasi dan bergerak di bidang-bidang seperti perbankan, perkebunan, perdagangan ekspor-impor, perhotelan, penerbitan, percetakan dan industri lainnya.

Jadi dapat dikerucutkan bahwa memberdayakan ekonomi umat di sini, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

2) Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Nnnnn Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya.

Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya

ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.

Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c) Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi umat berlangsung secara cepat. Strategi berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural yang selanjutnya dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi umat dalam perekonomian nasional.

Memberdayakan ekonomi umat secara proporsional sama dengan memberdayakan ekonomi rakyat. Karenanya, tidak heran jika aspek pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi tema sentral bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus pula ditunjukkan pada perbaikan keadilan. Aspek keadilan ini harus diterjemahkan dalam konsep ekonomi dan secara politis dapat diterima.

Di Indonesia sendiri, untuk menghadapi perkembangan perekonomian, pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengarahkan strateginya kepada pembangkitan ekonomi rakyat. Berdasarkan hasil sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK), pemerintah telah meluncurkan 13 skema kredit bagi perekonomian rakyat dan sebuah skema kredit khusus bagi pengusaha angkutan kota, kesemuanya bernilai Rp 10,8 triliun. Tingkat bunganya bervariasi antara 8,5% hingga 30%.

Pola distribusi kredit tersebut mengambil beberapa bentuk. Namun kesemuanya melalui bank pelaksana sebagai penyalur dana dari Bank Indonesia. *Pertama*, Kredit Usaha Tani (KUT) dari bank penyalur kepada

petani melalui KUD. *Kedua*, Kredit Kepada Koperasi (KKOP) dari bank penyalur kepada koperasi untuk dipakai sendiri oleh koperasi sebagai unit usaha. *Ketiga*, Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA), dari bank melalui koperasi primer kepada anggotanya. *Keempat*, Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam rangka Pengentasan Kemiskinan (KPTTGTASKIN), dari bank kepada kelompok, untuk dipakai oleh kelompok secara otonom. *Kelima*, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) baik tipe Rumah Sederhana (RS) maupun Rumah Sangat Sederhana (RSS). Sebenarnya kredit ini adalah sebuah kredit konsumsi, yang ikut membantu pengusaha *real-estate* yang pengusaha besar. Penyalurannya dari bank langsung kepada nasabah pemakai rumah. *Keenam*, adalah Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat KMK-BPR, dari bank melalui BPR/BPR-Syari'ah kepada anggotanya.

Pola kredit tersebut bisa dimanfaatkan oleh umat Islam melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan BPR-S. Salah satu jenis kreditnya adalah nasabah pengusaha kecil yang menerima kredit dari BMI untuk melakukan kegiatan produktif, dengan plafon kredit maksimal Rp 50 juta. Kredit ini disalurkan dalam pola bagi hasil (*profit-sharing*) yang berlaku pada BMI sesuai dengan syari'at Islam. Nisbah bagi hasil tersebut uqivalen dengan tingkat bunga sebesar 16% per tahun, jika nasabah mendapat kredit langsung dari BMI, tetapi harus membayar 28 % per tahun jika menerimanya lewat BPR-S, sehingga BPRS menerima spread 12%. Jangka waktu pemakaian kredit cukup panjang, yakni 11 tahun untuk modal kerja dan 15 tahun untuk investasi. Agunan tidak diperlukan dan hanya kelayakan usaha saja sebagai jaminan.

Pola lain yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam melalui gerakan Islam adalah Kredit Modal Kerja Pengembangan BPR/BPR-S. Penerima kredit ini adalah BPR/BPR-S sebagai suatu badan usaha jasa perkreditan yang bertindak sebagai bank pelaksana. Yang memanfaatkan tentunya adalah nasabah BPR/BPRS untuk kegiatan produktif. Sisanya nasabah bergerak di bidang jasa, banyak di antaranya adalah perempuan atau ibu rumah tangga. Plafon kredit maksimal Rp 15 juta, suatu jumlah yang sudah cukup besar bagi nasabah BPR. Untuk BPRS, kredit dioperasikan dengan sistem bagi-hasil, dengan nisbah tingkat bunga ekuivalen 30%. Dari jenis kredit ini yang mengambil manfaat adalah BPRS yang bisa mengambil spread antara 12-15 persen.

Persoalannya adalah bagaimana gerakan Islam bisa memanfaatkan skema perkreditan di atas. Organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, NU atau ICMI dapat mengambil peranan. Sebagai contoh, program BMT yang diselenggarakan oleh ICMI bisa langsung memanfaatkan dana tersebut untuk memperbesar volume usaha BMT. Muhammadiyah telah menganjurkan tiap pengurus daerah tingkat kabupaten/kota untuk membentuk koperasi. Tidak ketinggalan, NU juga mempunyai proyek BPR. Sementara itu berbagai gerakan Islam maupun kelompok-kelompok muslim telah mendirikan BPR, misalnya Ikatan Persaudaraan Haji

Indonesia (IPHI). Jika dikaji lebih dalam, pemberdayaan ekonomi umat sendiri sebenarnya mengandung tiga misi. *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sadaqah, waqaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian.

Untuk sampai pada misi pertama, yang perlu dilakukan umat Islam adalah bagaimana ia sebagai pelaku bisnis. Kemudian komoditi apa yang harus dihasilkan, baik berupa jasa maupun komoditi barang yang tentu saja yang memenuhi kriteria *halalan wa thayyiban*, yakni barang jasa yang halal menurut syari'at Islam yang memenuhi kualitas tertentu secara minimal maupun maksimal. Kemudian bagaimana komoditi itu diproduksi, diperdagangkan dan dikonsumsi. Dalam hal ini ada dua faktor; (1) bagaimana kerangka prioritas barang dan jasa yang harus diproduksi. (2) siapa yang harus menerima manfaat.

Misi kedua, aspek etika dan syari'ah merupakan ciri khas persoalan ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam. Kaum muslim harus berbisnis berdasarkan etika bisnis. Misalnya tidak boleh menimbun (*boarding*) ketika masyarakat kelangkaan barang untuk mencari keuntungan, menyuap pejabat untuk mendapatkan order atau menipu konsumen dengan kualitas produk yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Jika dewasa ini tampak belum ada etika bisnis, maka sudah menjadi kewajiban bagi para pelakunya untuk merumuskan sebuah etika bisnis modern.

Misi ketiga, menjadikan umat Islam sebagai kekuatan ekonomi dalam arti positif. Dewasa ini kekuatan umat Islam baru dalam arti politis, sedangkan kekuatan ekonomi masih berada di tangan non-muslim. Kaum muslim masih lebih berkedudukan sebagai konsumen dari pada produsen. Sudah tentu sebagai konsumen adalah sebuah kekuatan tersendiri, tetapi kekuatan itu lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan non-muslim.

Menurut Abdul Munir Mul Khan, bahwa sebenarnya di bidang ekonomi, pemikiran Islam sangat potensial ditempatkan sebagai paradigma model harapan rasional (*rational expectation*) mengenai masa depan yang lebih berorientasi kemanusiaan. Resiko sosial mengenai ketidakadilan, ketimpangan dan kemiskinan menjadi dasar tumbuhnya kesadaran kemanusiaan para pelaku ekonomi dan politik. *Public choice* menjadi dasar pengembangan etika bisnis sebagai komitmen pelaku ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih memperhatikan berbagai persoalan mikro ekonomi-politik.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya.

3) Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat, perlu dijelaskan pengertian ekonomi Islam terlebih dahulu. Sebagian ahli memberi definisi bahwa ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki danditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri atas nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Atau sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasa dan siasat ekonomi Islam.

Masalah ekonomi memang selalu menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Meskipun demikian, usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh.

Kebanyakan penelitian yang dihasilkan telah menyimpang jauh dari motivasi semula sehingga menghilangkan tujuan sebenarnya. Di satu pihak pendapat yang menyarankan ke arah itu terlalu mementingkan hak individu dan mengesampingkan kepentingan masyarakat umum. Di lain pihak pendapatnya menolak keistimewaan hak individu. Oleh karena itu, di sini perlu diterangkan prinsip dasar berbagai sistem ekonomi yang penting, misalnya sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Kemudian dibandingkan untuk memposisikan bahwa sistem ekonomi Islamlah sebagai alternatifnya.

a) Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis

Ciri khas sistem ekonomi kapitalis adalah bahwa yang mengusahakan alat-alat keperluan manusia adalah individu. Individulah yang menentukan apa dan berapa dia akan menghasilkan, dengan siapa dia akan membuat dan dengan harga berapa dia akan menjual.

Prinsip dasar yang dipakai sistem ekonomi kapitalis adalah; *pertama*, kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Setiap Negara mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan. *Kedua*, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisasi dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh sebanyak-banyaknya keuntungan. Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, selagi aktivitas yang dilakukan itu sah dan menurut peraturan negara tersebut. Berdasarkan prinsip ekonomi dan tuntutannya yaitu persaingan bebas, maka untuk itu setiap individu dapat menggunakan potensi fisiknya, mental dan sumber-sumber yang tersedia untuk dimanfaatkan bagi kepentingan individu tersebut. *Ketiga*, ketimpangan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Individu-individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ketidaksamaan kesempatan mewujudkan jurang perbedaan di antara golongan kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.

Melalui prinsip-prinsip yang dipakai oleh sistem kapitalis, maka sistem ini mempunyai kebaikan dari segi bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat, bukan saja berupaya meningkatkan kekayaan negara, tetapi dapat mewujudkan distribusi kekayaan secara rasional. Karena persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel tersebut. Persaingan akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Di samping itu, menurut para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, sebanding dengan tujuan untuk memaksimumkan produksi.

Sistem ekonomi kapitalis tersebut memiliki banyak kelemahan, di antaranya; *pertama*, persaingan bebas yang tak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi. Sebagai contoh; hak individu yang tidak terbatas untuk memiliki harta mengakibatkan pengumpulan kekayaan secara berlebih-lebihan oleh beberapa

individu. Ini mengakibatkan distribusi kekayaan tidak seimbang dalam masyarakat dan seterusnya menyebabkan rusaknya sistem ekonomi. *Kedua*, persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu untuk kepentingan individu dan kepentingan umum akan menimbulkan bahaya dan ketidakselarasan dalam masyarakat. Apabila kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat, dan inipun akan mengganggu sistem ekonomi. *Ketiga*, nilai-nilai moral yang tinggi seperti persaudaraan, kerjasama, saling membantu, kasih-sayang dan bermurah hati, tidak lagi berharga dan tidak dipedulikan lagi dalam masyarakat. Nilai-nilai itu akan digantikan oleh nilai-nilai seperti sifat menguntungkan diri sendiri, pendendam dan permusuhan pada sesama. Semua orang bekerja untuk mencapai motivasi pribadi dan tidak terdapat tujuan yang mendorong mereka bekerja untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. *Keempat*, perbedaan yang menyolok antara hak-hak majikan dan pekerja akan menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang bersaing yang mempunyai kepentingan-kepentingan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Penerima upah tidak menikmati kesempatan yang sama dengan saingannya yaitu seorang majikan kapitalis tadi, yang mempunyai segala kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, ketrampilan yang sempurna, dan pekerjaan yang baik. Ketidakadilan itu semakin memperdalam jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. *Kelima*, secara singkat sistem kapitalis di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi di bawah penguasaan para ahli, yang mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi mengalirnya kekayaan hanya melalui saluran-saluran yang sempit. Di pihak lain, menjamin kesejahteraan semua pekerja kepada beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri.

Demikianlah sistem ekonomi dalam perspektif liberalis yang jauh dari tatanan humanis dan bertolak belakang dengan konsep ekonomi yang islami. Yang akan semakin memperlebar *gap* antara yang kaya dan miskin, tanpa adanya *ta'awun* yang bermartabat antara yang di atas dan di bawah.

b) Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis pertama kali diusung oleh Marxisme. Marxisme telah mengambil sikap bahwa yang memimpin dan memutuskan persoalan-persoalan ekonomi adalah pemerintah, sedangkan individu-individu hanya menjalankan apa yang dikomandokan oleh pemerintah itu. Di samping itu, individu-individu itu juga tidak boleh memiliki apa yang mereka hasilkan, tetapi hasilnya itu dipandang sebagai hak milik pemerintah yang

mengumpulkannya dan membagikannya kepada seluruh rakyat secara adil.

Prinsip dasar yang dipakai sistem ekonomi sosialis adalah; *pertama*, pemilikan harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian individu secara langsung tidak mempunyai hak pemilikan. *Kedua*, kesamaan ekonomi. Sistem sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. *Ketiga*, disiplin politik. Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara ditetakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapuskan sama sekali.

Prinsip-prinsip dasar tersebut memiliki beberapa kebaikan, seperti setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya termasuk makanan sebanyak dua kali sehari, beberapa helai pakaian, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat tinggal dan lain-lain. Kemudian setiap individu mendapat pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara. Lalu semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan (negara) yang sempurna di antara produksi dengan penggunaannya. Dan semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, dan keuntungan yang diperolehnya akan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Sistem ekonomi sosialis juga memiliki banyak kelemahan, di antaranya; *pertama*, tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali sehari. *Kedua*, sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berpikir serta bertindak. *Ketiga*, dalam sistem sosialis semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. *Keempat*, sistem ekonomi sosialis mencoba untuk mencapai tujuan melalui laranganlarangan eksternal dan mengesampingkan pendidikan moral dan latihan individu. Jadi, secara keseluruhan sistem ekonomi sosialis mencoba untuk mengubah ketidaksamaan kekayaan dengan menghapuskan hak kebebasan individu dan hak terhadap pemilikan yang mengakibatkan hilangnya semangat untuk bekerja lebih giat dan berkurangnya efisiensi kerja buruh.

c) Sistem Ekonomi Islam

Antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, sistem ekonomi Islam menempati posisi moderat. Oleh karena itu, orang-orang Islam oleh kaum komunis dinamakan borjuis. Jika ditelusuri, sebenarnya sistem ekonomi Islam lebih dekat kepada sistem sosialis.

Dikatakan moderat, karena sistem ekonomi Islam memiliki prinsip dasar sebagai berikut: *pertama*, kebebasan individu. Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat. *Kedua*, hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Meskipun demikian, ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. *Ketiga*, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang-perorang tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan. *Keempat*, kesamaan sosial. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Di samping itu, sangat penting setiap individu dalam sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. *Kelima*, jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhannya sesuai prinsip “hak untuk hidup”. *Keenam*, distribusi kekayaan secara meluas. Islam mencegah penumpukkan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Islam juga melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penumpukkan harta itu. *Ketujuh*, larangan terhadap organisasi anti sosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum arak, riba, pasar gelap, dan penimbunan. *Kedelapan*, kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing

dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.

Setelah dikemukakan karakteristik ketiga sistem ekonomi tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Bahkan dalam beberapa hal, merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada dua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka. Minimal tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Al-Qur'an sendiri, sebagai sumber utama sistem ekonomi Islam menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا أَسْبَغْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الأَرْضِ...¹

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah. Bagi si miskin tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah untuk

pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.

Menurut sistem ekonomi Islam, penumpukkan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Secara tegas al-Qur'an menyebutkan bahwa di dalam harta yang bertumpuk-tumpuk itu, terdapat harta orang lain:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً...

“Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) agar (dengan zakat itu) bisa membersihkan mereka”.

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problem kesenjangan, gelandangan, problem Kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.

Hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain: a) Mensyukuri karunia Illahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki dan iri; b) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan; c) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin.

Mendalami sistem tersebut akan mendapatkan kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang berkembang menurut konsep persaingan bebas dan hak pemilikan yang tidak terbatas, ataupun kelemahan sistem ekonomi sosialis yang tumbuh akibat pengawasan yang terlalu ketat

dan sikap diktator golongan kaum buruh serta tidak adanya pengakuan hak pemilikan terhadap harta. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjadi kekayaan secara merata, tidak adanya konglomerasi.

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha); dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan; semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Hak akan harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti dalam sistem kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut mengakibatkan kekayaan senantiasa beredar secara terus menerus di kalangan orang banyak dan tidak terakumulasi hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Setiap individu mendapat bagian yang sewajarnya serta adil dan negara menjadi semakin makmur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi Islamlah yang mengarah pada pemerataan ekonomi. Karenanya, jika sistem ini dijalankan dengan sendirinya masyarakat akan dapat diberdayakan, karena memiliki kesempatan dan hak yang sama.

KESIMPULAN

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha); dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan; semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Hak akan harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti dalam sistem kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut mengakibatkan kekayaan senantiasa beredar secara terus menerus di kalangan orang banyak dan tidak terakumulasi hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Setiap individu mendapat bagian yang sewajarnya serta adil dan negara menjadi semakin makmur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi Islamlah yang mengarah pada pemerataan ekonomi. Karenanya, jika sistem ini dijalankan dengan sendirinya

masyarakat akan dapat diberdayakan, karena memiliki kesempatan dan hak yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2000. "Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Umat". dalam Amin Abdullah, dkk., *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Alimin & Muhammad. 2000. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Al-'Assal, Ahmad Muhammad. 1999. *al-Nidham al-Iqtishad fi al-Islam: Mabadiuhu Wahdafuhu*, terj. Imam Syaifudin. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Surabaya: Risalah Gusti.
- Cahyono, Imam. "Pemihakan Kepada The New Mustadz'afin", dalam Kompas, Jakarta, 3 Desember 2004.
- Isma'il, Nur Mahmudi. 2001. "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul", dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat*, Bandung: ISTECS.
- Machendrawaty, Nanih. & Safei, Agus Ahmad. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam; Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*. Bandung: PT, Remaja Rosda Karya.
- Mubyarto, 1997. *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Adtya Media.
- _____, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad, 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2000. "Moral Kenabian: Paradigma Intelektual Pembangunan", dalam Amin Abdullah, dkk., *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Parwiranegara, Syafruddin. 1988. *Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam*. Jakarta: Haji Masagung.
- Qardhawi, Yusuf . 1991. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1418 H. *al-Qur'an dan Terfemahnya*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushafal-Syarif.